

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- _____. *Undang-Undang tentang Administrasi Negara*. UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.
- _____. *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. UU No. 24 Tahun 2003. LN No. 98, TLN NO. 4316
- _____. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157, TLN NO. 5076.
- _____. *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*. Nomor 01/PMK/2023
- _____. *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*. Nomor 06/PMK/2023
- _____. *Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*. Putusan No. 2/MKMK/L/11/2023

B. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press, 2005
- _____. *Model-model Pengujian Konstitusional, Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- _____. *Penegakkan Tiang Konstitusi*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. *Metode Penelitian Sosial (Terapan dan Kebijakan)*. Jakarta. 2000.

- Cornelis, Vieta Imelda. *Hukum Pemerintahan Daerah (Peraturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*. Surabaya : Aswaja Pressindo. 2016
- Gaffar, Janedjri M. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Penerbit Konstitusi Press (Konpress). 2013
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2009
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2019
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2013
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. *Kansil. Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta. 1997
- Marzuki, Suparman. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta : FH UII Press. 2017
- Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Pustaka Setia. 2011
- Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press. 2014
- Setiawan, Yudhi, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, dan Imam Ropii. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*. Depok: Rajagrafindo Persada. 2017
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi 2)*. Jakarta : Sinar Grafik. 2015.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2016.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Rosidin, Utang dan A. Rusdiana. *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung : Pustaka Setia. 2018
- Wiryanto. *Etik Hakim Konstitusi Rekontruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2019

Zoelva, Hamdan. *Mengawal Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress). 2016

C. Lain-lain

Ahmadi. "Konstitusional Review: Suatu Perbandingan Praktek Ketatanegaraan". *Al-Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian*. Diterbitkan oleh E-Journal IainKendari Vol. 9 No. 1. 2014

Amin, Irfan. "Ketua dan Wakil Ketua MK akan Dipilih di Rapat Pleno Hari Ini" tersedia di: Ketua dan Wakil Ketua MK akan Dipilih di Rapat Pleno Hari Ini (tirto.id), diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

Andhika. "Diberhentikan sebagai Ketua MK, Anwar Usman tidak Bisa Ajukan Banding" tersedia di: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/627890/diberhentikan-sebagai-ketua-mk-anwar-usman-tidak-bisa-ajukan-banding>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024

Ardian, Kevin. Tesis: Pelaksanaan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Di Kota Depok, (Depok: Universitas Indonesia. 2012).

Auliadi, Mohammad Iqbal Alif. dkk, "Konskuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK No. (90/PUU-XXI/2023) *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, diterbitkan oleh Sosio Yustisia, (Vol. 4 No. 1, Tahun 2024)

Ayu, Zandy Wulan dan Haidar Adam. "Putusan Ulta Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang" *E-Journal Unair*, diterbitkan oleh Yuridika. Vol. 29 No. 2 Tahun 2014

Azhari, Aidul Fitriadi. "Kekuasaab Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi : Upaya Menemukan Keseimbangan". *Publikasiilmiah UMS*, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol. 2 No. 1 Tahun 2005.

Azizah, "Ketua MA: Keadilan Harus Dapat Dijangkau Oleh Setiap Warga Negara", tersedia di : <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5928/ketua-ma-keadilan-harus-dapat-dijangkau-oleh-setiap-warga-negara>. Diakses tanggal 2 Maret 2024.

- Bachaqi, Ja'far. "Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi. Vol. 10 No. 3 Tahun 2013.
- D, Bintang, dkk. "Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, diterbitkan oleh Jurnal Kolibi (Vol. 1 No. 2, 2023)
- Disantara, Fradhana Putra dkk, "Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan *Constitutional Ethics*" *Jurnal litigasi*, diterbitkan oleh *Journal UNPAS*. Vol. 24 No. 1 Tahun 2023.
- Gaffar, Janedjri M. "Hakim Konstitusi dan Negarawan", tersedia di: [Hakim Konstitusi dan Negarawan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](https://mkri.id). Diakses tanggal 20 Maret 2024.
- Geograf, "Pengertian Kekuasaan Kehakiman: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli", tersedia di [Pengertian Kekuasaan Kehakiman: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf](#), diakses pada tanggal 16 Februari 2024.
- Handayani, Irma. Skripsi: Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017). Jakarta: UIN Jakarta. 2018
- Madekhan. "Posisi dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Vol. 7 No. 2 Tahun 2018.
- Muh, Andi, Taqiyuddin BN, dkk. "Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada 'Umar" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, diterbitkan oleh Zenodo. (Vol. 1, No. 11, 2023)
- Muhtadi, Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, (Lampung; Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No.3, 2015
- Mujadi, Miftachul dan Sri Astutik. "Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Diterbitkan oleh Jurnal Justitia. Vol. 6 No. 2 Tahun 2023

Nasir, Cholidin. "Judicial review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia"
Jurnal Hukum Progresif Diterbitkan oleh Garuda Kemdikbud Vol. 8 No.
1 2020

Nurcahyadi, Ghani. "Diberhentikan Jadi Ketua MK, Anwar Usman Tetap Jadi
Hakim Konstitusi" tersedia di: <https://rb.gy/q66mno>. Diakses pada
tanggal 12 Juni 2024

Pa-banggai. "Pedoman Pengawasan", tersedia di: <https://pa-banggai.go.id/pengawasan-dan-pendisiplinan/pedoman-pengawasan>,
diakses pada tanggal 16 April 2024

Perludem, "Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan
Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023", tersedia
di : <https://perludem.org/2023/10/17/tafsirserampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no90-puu-xxi-2023/>, diakses tanggal : 4 Juni 2024

Ramadhan, Bilal. "Ini 3 Opsi Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah
Konstitusi Menurut Jimly Asshiddiqie", tersedia di :
<https://news.republika.co.id/berita/s3f69r330/ini-3-opsi-sanksi-pelanggaran-kode-etik-hakim-mk-menurut-jimly-asshiddiqie>. Diakses
tanggal: 15 April 2024

Rizki, Mochamad Januar. "Membedah di Balik Putusan MK Soal Batas Usia
Capres-Cawapres", tersedia di :
<https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt652f38c498a9e>, diakses tanggal 3
Juni 2024

Saputra, A. (2022). "Luka KY yang Berkali-kali Kewenangannya
Dilumpuhkan MAHKAMAH KONSTITUSI". Tersedia di:
<https://news.detik.com/berita/d-6338937/luka-ky-yang-berkali-kali-kewenangannya-dilumpuhkan-MahkamahKonstitusi> (Diakses Pada
Tanggal 2 Februari 2023)."

Sari, Yustina. Tesis: *Analisis Susunan, Kedudukan dan Peran Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Fungsi
Pengawasan Terhadap Halim Konstitusi dan Relasinya dengan
Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
2015

- Septhiany, Herti. Tesis: Prinsip Transparansi Dalam Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi: Analisis Independensi Hakim Konstitusi. Jakarta: Universitas Indonesia. 2020
- Setiawan, Adam dan Nehru Asyikin. "Urgensi Redesain Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Pasca Revisi UU Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Diterbitkan oleh Juris LK 2 FHUI Vol. 12 No. 2. 2022
- Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, dan Neni Nurjanah. "Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Ilmu Hukum*. Diterbitkan oleh Jurnal Studia Legalia. Vol 3 No. 2 2022
- Sorik, Sutan. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)". *Jurnal Konstitusi* Vol. 15. 2018
- Suzeeta, Nala Syandhira dan Kayus Kayowuan Lewoleba, Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, diterbitkan oleh Penerbit Daarul Huda, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023.
- Ulum, Hafizatul dan Sukarno. "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan yang Ditetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)". Diterbitkan oleh Unizar Law Review. Vol. 6 No. 2 Tahun 2023.
- Yasser, Bram Mohammad. "Pengujian Unsur Penyalagunaan Wewenang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi". *Ejournal Kopertis*, diterbitkan oleh Sumatera Law Review. Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.
- Yuniati, Sri dan Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, diterbitkan oleh *Master of Notarial Laws*. Vol. 4 No. 4 Tahun 2017
- Yusuf, M. Aris. "Pengertian Administrasi Negara: Fungsi, Tujuan, dan Ciri-cirinya!". tersedia di <https://www.gramedia.com/literasi/administrasi-negara/>. diakses pada tanggal 16 Februari 2024.

Zulmi, Dukatis. Skripsi: Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013), Jakarta: UIN Jakarta. 2020

Zulqarnain, Cantika Dhea Marshanda dkk, "Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024" *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, diterbitkan oleh Jurnal Kolibi (Vol. 1 No. 2, 2023)